

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan dibidang keolahragaan diperlukan upaya pengembangan manusia seutuhnya melalui pembangunan karakter dan penanaman nilai positif sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang mampu membentuk identitas sosial yang berintegrasi ke dalam masyarakat;
 - c. bahwa diperlukan suatu pengaturan yang memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

3. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang melibatkan aspek-aspek administratif, logistik, dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan prestasi atletik, promosi kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas fisik.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
8. Olahragawan amatir adalah Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
9. Olahragawan Profesional adalah Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
13. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Tradisional adalah Olahraga yang berasal dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat, yang biasanya melibatkan keterampilan, permainan, atau aktivitas fisik yang diwariskan dari generasi ke generasi.
17. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

18. Olahraga Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
19. Teknologi Keolahragaan adalah mengupayakan untuk mengefektifkan tes dan pengukuran di dalam kegiatan olahraga.
20. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
24. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
25. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
26. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah sekolah pembibitan olahraga tingkat daerah yang digunakan untuk mencari dan membina bakat olahraga.
27. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah sekolah khusus yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah yang berfungsi untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang olahraga.
28. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.
29. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
30. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
31. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga Prestasi yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga nasional/internasional.
32. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disingkat INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.

33. Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang Olahraga Profesional tertentu.
34. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
35. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
36. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan berupa DOD.
- (2) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana strategis Keolahragaan; dan
 - b. rencana teknis Keolahragaan.
- (3) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam DOD.
- (5) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilakukan pada lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Olahraga Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu memperhatikan:
 - a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah organisasi Olahraga, klub, perkumpulan, sarana dan/atau sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - d. rasio Tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi pada jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
- (2) Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PELAKU OLAHRAGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peolahraga;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Peolahraga

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Peolahraga untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga dengan sarana prasarana publik yang layak;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - f. mengembangkan Industri Olahraga; dan
 - g. melakukan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

- (2) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:
- a. peningkatan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. kemudahan izin untuk mengikuti kegiatan Olahraga dan/atau kompetisi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. peralihan status menjadi Olahragawan profesional.
- (2) Fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:
- a. pemenuhan hak untuk didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pemenuhan hak untuk mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. kemudahan izin untuk
 - d. mengikuti kegiatan dan/atau kompetisi Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan dan antar daerah.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan perpindahan Olahragawan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan cabang Olahraga.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan Daerah.

Bagian Ketiga Pembina Olahraga

Pasal 9

- Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pembina Olahraga untuk:
- a. memperoleh peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
 - b. memperoleh penghargaan; dan
 - c. memperoleh bantuan hukum.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Pasal 10

- (1) Tenaga Keolahragaan berupa:
- a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga kesehatan;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. psikolog;
 - o. tenaga pengawas doping;
 - p. relawan, dan
 - q. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
 - b. konsultasi pengembangan karier dan pelayanan kesejahteraan;
 - c. bantuan hukum; dan/ atau
 - d. penghargaan.

BAB V
ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat membentuk Organisasi Olahraga berupa:
- a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. INORGA;
 - c. Induk Organisasi Olahraga Fungsional;
 - d. perkumpulan; dan/atau
 - e. klub.
- (2) Setiap organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat membentuk komite Olahraga.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Organisasi Olahraga dalam hal:

- a. pembentukan dan monitoring evaluasi khusus terhadap Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. menetapkan komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
- c. pemberian bantuan pendanaan secara proporsional.

BAB VI

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga setiap 2 tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan Prasarana Olahraga yang mempertimbangkan:
 - a. pemerataan jumlah dan jenis di seluruh wilayah Daerah;
 - b. standar keamanan dan keselamatan; dan
 - c. kekhususan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan Prasarana Olahraga yang telah menjadi asset/milik Pemerintah Daerah.
- (4) Aset/milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat pengalihfungsian Prasarana Olahraga, pihak yang melakukan pengalihfungsian berkewajiban mengganti ketersediaan Prasarana Olahraga yang sama atau lebih baik.

Pasal 15

- (1) Masyarakat turut bertanggung jawab untuk memelihara Prasarana Olahraga dan ruang terbuka yang telah dibangun.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta menyediakan Prasarana Olahraga.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Olahraga menggunakan Sarana Olahraga yang:
 - a. sesuai standar teknis cabang Olahraga;
 - b. sesuai standar keselamatan; dan
 - c. sesuai petunjuk penggunaan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ketersediaan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan Olahraga pada lingkup:
- (2) Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler; dan
 - b. jalur Pendidikan nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten.
- (5) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan Olahraga Pendidikan berupa:
 - a. pendirian lembaga-lembaga pendidikan, SKO, KKO, dan klub Olahraga sekolah;
 - b. penyusunan kurikulum Pendidikan; dan
 - c. penyediaan guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten.
- (6) Fasilitasi pendirian SKO yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam pendirian KKO dan klub Olahraga sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VIII OLAHRAGA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi Olahraga.
- (2) Dalam pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia;
 - b. promosi Olahraga Masyarakat;
 - c. pelaksanaan advokasi terhadap gaya hidup sehat aktif;

- d. pengaktifan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat;
 - e. peningkatan pariwisata Olahraga;
 - f. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pendamping Olahraga tingkat kalurahan dan kelurahan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional.
- (2) Dalam pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. pengembangan, promosi, dan pengawasan Olahraga Tradisional;
 - b. pemberian dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan atlet dan instruktur Olahraga Tradisional yang dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan Daerah;
 - c. melindungi dan melestarikan warisan budaya terkait dengan Olahraga Tradisional dengan mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik Olahraga Tradisional; dan
 - d. mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam kegiatan Olahraga Tradisional melalui program-program pengembangan Olahraga Tradisional.

BAB IX OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan pengurus daerah cabang Olahraga bertanggungjawab terhadap peningkatan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan pengurus daerah cabang Olahraga dalam melaksanakan peningkatan Olahraga Prestasi memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - b. penumbuhkembangan sentra pembinaan Olahraga;
 - c. pembinaan cabang olahraga unggulan daerah atau prioritas;
 - d. pelaksanaan proses regenerasi Olahragawan melalui pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat;
 - e. peningkatan kompetensi Pelaku Olahraga;
 - f. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - g. Pengiriman Olahragawan dalam kompetisi ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan pengurus daerah cabang Olahraga melibatkan pelatih yang memiliki

- kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Peningkatan Olahraga Prestasi juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.

BAB X OLAHRAGA DISABILITAS

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan komite/perkumpulan yang menangani Olahraga Disabilitas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi:
 - a. pengembangan kapasitas komite/perkumpulan yang menangani Olahraga Disabilitas;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah dan nasional; dan
 - d. penyediaan guru pendidikan jasmani, pelatih, dan instruktur serta *classifier* yang kompeten.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah memperhatikan:
 - a. klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik; dan
 - b. latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB XI OLAHRAGA AMATIR DAN PROFESIONAL

Pasal 22

Ketentuan mengenai Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

BAB XII INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 24

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat memperhatikan tujuan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam peningkatan Industri Olahraga meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. bantuan pendanaan; dan/atau
 - c. pengadaan *event* Olahraga.

Pasal 25

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk sarana dan prasarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan nasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah dan nasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan *event* Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka; dan/atau
 - h. pengelolaan Suporter.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan prestasi, pariwisata, ekonomi dan kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/ atau organisasi lain.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA, KEJUARAAN DAN FESTIVAL
OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah untuk satu jenis Cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan tingkat kabupaten/kota;
 - b. kejuaraan tingkat Daerah/provinsi;
 - c. pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - d. pekan Olahraga tingkat Daerah/provinsi;
 - e. festival Olahraga tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - f. festival Olahraga tingkat Daerah/provinsi.
- (5) Penyelenggaraan pekan Olahraga dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lingkup:
 - a. antar pelajar/antar satuan pendidikan;
 - b. antar mahasiswa/antar perguruan tinggi; dan
 - c. antar organisasi Olahraga.
- (6) Selain penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf d dan ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga dan kejuaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Penyelenggaraan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup Olahraga Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prosedur keamanan dan ketertiban; dan
 - b. prosedur keselamatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk penanggungjawab.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan kepolisian yang berwenang.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Antar Pelajar/Antar Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga/kejuaraan antar pelajar/antar satuan pendidikan dalam jenis Olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Antar Mahasiswa/Antar Perguruan Tinggi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga/kejuaraan antar mahasiswa/antar perguruan tinggi.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan organisasi Olahraga yang membina Olahraga mahasiswa di Daerah.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Antar Organisasi Olahraga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan Olahraga/kejuaraan antar organisasi Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan komite Olahraga di Daerah.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga/kejuaraan bagi Penyandang Disabilitas paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan komite Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan festival Olahraga Daerah paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan komite Olahraga yang menangani Olahraga Masyarakat di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk meningkatkan minat Olahraga Masyarakat dan memasalkan Olahraga Tradisional.

BAB XIV

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembinaan jangka panjang bagi atlet;
 - b. pembentukan PPLPD ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penelitian Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - e. bantuan dan bimbingan teknis;
 - f. pendampingan;
 - g. bantuan program;
 - h. bantuan peralatan;
 - i. bantuan pendanaan;
 - j. penyediaan informasi; dan
 - k. kemudahan pelayanan perizinan.
- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan akademisi dan praktisi di bidang keolahragaan.
- (5) Fasilitasi pembentukan PPLPD ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. setiap Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. organisasi Olahraga;
 - d. perseorangan;
 - e. lembaga pemerintah;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. badan usahayang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d dapat berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. beasiswa;
 - c. fasilitasi kemudahan mendapatkan pekerjaan;
 - d. keikutsertaan dalam pembinaan Olahragawan jangka panjang; dan/atau
 - e. piagam penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai huruf g dapat berupa piagam penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. tahapan pembinaan; dan
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (5) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial kepada setiap Olahragawan dan Pelaku Olahraga sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan; dan/atau
 - c. jaminan kematian.
- (7) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengembangan organisasi Olahraga;
 - b. keikutsertaan dalam permainan dan perlombaan;

- c. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat; dan/atau
- d. penyediaan Sarana Olahraga dan Prasarana Olahraga.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.

Pasal 37

Sumber Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Dalam konteks keolahragaan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pembangunan sosial dengan fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat. Potensi ini dapat diaktifkan melalui penerapan insentif-insentif yang bertujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di bidang keolahragaan memiliki implikasi yang lebih dalam daripada sekadar prestasi atletik; ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menggali potensi masyarakat melalui keolahragaan adalah adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah. Pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi olahraga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program olahraga yang efektif. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat-bakat lokal,

memberdayakan generasi muda, dan mempromosikan prinsip-prinsip positif seperti kesehatan dan disiplin.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini adalah prinsip yang telah terbukti selama bertahun-tahun, dan dengan mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga, DIY dapat mengurangi tingkat masalah sosial di masyarakat. Gangguan kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesejahteraan mental dapat dikurangi dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga yang teratur.

Namun, meskipun DIY memiliki potensi yang besar, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, termasuk pemberdayaan masyarakat yang terbatas pada minat dan bakat yang belum terakomodasi, akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat terhambat, dan masalah utama adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mengoptimalkan potensi masyarakatnya, DIY perlu mengembangkan kebijakan pemerintah daerah yang kokoh. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek keolahragaan, seperti pembinaan dan pengembangan olahraga, organisasi olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga, fasilitas olahraga, pendanaan olahraga, atlet olahraga, serta partisipasi masyarakat dalam keolahragaan. Peraturan Daerah ini harus dibuat dengan konsultasi yang luas dengan semua pemangku kepentingan dan harus didasarkan pada penelitian yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi masyarakat DIY di bidang keolahragaan. Dengan demikian, DIY dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga yang berkelanjutan dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengenalan Olahraga” adalah gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Peolahraga berbakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanduan” adalah penelusuran sumber potensi bibit Peolahraga berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan bakat” adalah pendidikan dan pelatihan bibit Peolahraga berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Peolahraga berpotensi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan prestasi pada jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat” adalah pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Peolahraga berprestasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan formal di jam sekolah dan mengikuti kurikulum.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan non formal di luar jam sekolah yang dilakukan dengan tujuan pengembangan nilai dan bakat tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Contoh pendirian lembaga-lembaga pendidikan adalah Sekolah bela diri yang ditujukan khusus untuk pendidikan bela diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan adalah kurikulum yang mendukung Olahraga Pendidikan, termasuk kurikulum bagi SKO dan KKO.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten” adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam Olahraga Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan advokasi terhadap gaya hidup sehat aktif adalah usaha atau tindakan untuk mendukung, mempromosikan, dan menyuarakan kepentingan atau nilai-nilai tertentu terkait dengan menjaga pola asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga secara rutin, memilih nutrisi pendukung yang tepat dan mengikuti komunitas guna mendapat dukungan dari orang yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “*classifier*” adalah penyusun sistem klasifikasi/penggolongan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendekatan” adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan ”bisnis secara beretika” adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “event” adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud akses terhadap informasi keolahragaan termasuk akses terhadap intelegen olahraga.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang” atau Long Term Athlete Development yang disingkat LTAD adalah pola pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan guna meningkatkan prestasi Olahraga. Contoh pembinaan Olahragawan jangka Panjang adalah pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a
Yang dimaksud anggaran pendapatan belanja daerah termasuk dana keistimewaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...